

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat pada hakikatnya adalah usaha meningkatkan kemampuan manusia, agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidupnya. Santoso S Hamijoyo (1970), mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat adalah usaha meletakkan dasar dan situasi yang memungkinkan tumbuhnya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu ditumbuhkan prasyarat mental pembangunan yaitu, alam pikiran, sikap cara-cara hidup yang menguntungkan bagi tumbuhnya kemauan, inisiatif dan swadaya untuk memecahkan masalah-masalah dan kebutuhan yang sebenarnya.

Manusia dalam pembangunan di samping sebagai objek juga harus dipandang sebagai subjek pembangunan, yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam mencapai cita-cita pembangunan. Manusia dalam pembangunan merupakan sumber daya utama yang perlu dikembangkan, agar manusia itu sendiri dapat menolong dirinya sendiri. Sumber daya dalam hal ini mengandung pengertian yang luas, tidak hanya mengembangkan keterampilan dan kecakapan semata-mata, namun meliputi pengembangan kebiasaan kerja yang baik, konsumsi yang tradisional, pola-pola kehidupan dan sikap yang tepat terhadap belajar, inovasi, kerja sama, berdikari dan partisipasi.

Pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat mengurangi bahkan meniadakan kemiskinan, yang masih menyelimuti semua lapisan masyarakat terutama masyarakat desa di negara-negara yang sedang berkembang. Sehubungan dengan itu, Irma Adelman (Thee Kian Wie, 1981, h.183-184) mengemukakan tujuan jangka panjang pembangunan sebagai berikut :

Menurut hemat saya atas dasar moral, tujuan jangka panjang yang pantas untuk kebijakan pembangunan nasional dari setiap bangsa seharusnya adalah untuk mengurangi secara berturut-turut hambatan dari sistem untuk mewujudkan sepenuhnya potensi manusia dan para anggota bangsa itu. Dengan demikian tujuan pembangunan ekonomi meliputi dua hal : untuk menyediakan landasan material, untuk mencapai tujuan ini dan untuk menciptakan kondisi ekonomi untuk mengurangi hambatan-hambatan lain untuk mewujudkan diri sendiri (tersedianya kesempatan untuk pendidikan, kepuasan dalam pekerjaan, status adanya jaminan, dapat mengeluarkan pendapat sendiri dan kekuasaan). Keseimbangan yang wajar antara kedua tujuan ekonomi ini adalah dinamis dan akan tergantung pada keadaan kesejahteraan dari golongan penduduk yang termiskin pada tiap titik dimana suatu keputusan harus diambil.

Definisi dari tujuan pembangunan ini, yang akan saya namakan "depauperisasi" (peniadaan kemiskinan) adalah berperikemanusiaan, terutama spiritual, dan sangat dinamis.

Jumlah penduduk yang miskin sebagai sasaran utama dalam pembangunan masih cukup besar, sebagaimana menurut laporan Bank Dunia tahun 1978 (Emil Salim, 1980, h. 60) terdapat 800 juta orang menghuni negara-negara yang sedang berkembang dengan kehidupannya berada dalam tarap kemiskinan absolut; memiliki kesempatan kerja dan pendidikan yang minimal, hidup tanpa cukup makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan lain-lain yang layak bagi

martabat hidup manusia. Menurut laporan tersebut di Indonesia terdapat 72 juta orang atau 55 persen dari jumlah penduduk 132 juta orang tahun 1975. Dari jumlah itu 17 persen berada di kota dan selebihnya ada di desa.

Sikap mental penduduk miskin kurang menguntungkan bagi usaha memperbaiki tingkat kesejahtraannya, seperti sikap mental yang kurang berorientasi ke masa depan, kegiatan kerja lebih diorientasikan hanya untuk hidup dan kedudukan, tidak disiplin, kurang memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri. Keadaan ini ada hubungannya dengan sistem nilai budaya yang dianutnya (Koentjaraningrat , 1983, h. 34).

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional Indonesia, manusia merupakan titik sentral pembangunan. Hal ini dinyatakan dalam GBHN pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 sebagai berikut :

Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan keserasian dan keseimbangan antara keduanya; bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air; bahwa bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita (GBHN, 1983, h. 19).

Dengan demikian pembangunan manusia seutuhnya, keberhasilan ditandai antara lain oleh : Pertama, adanya peningkatan dalam memenuhi kebutuhan lahiriah secara layak seperti kebutuhan pangan, perumahan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Kedua, adanya keadaan yang aman, kebebasan, dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, adanya keseimbangan antara pertambahan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia sehingga dengan kegiatan kerja anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan lain dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Keempat, terdapat situasi yang dapat memudahkan anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya, menentukan hari depan, kebebasan memilih dan mengeluarkan pendapat dalam rangka keikutsertaan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan.

Tujuan jangka panjang pembanguana Nasional adalah pembangunan ekonomi, yang dalam pelaksanaannya lebih diprioritaskan pada pembangunan sektor pertanian sebagai mata pencaharian bagian terbesar masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi dalam hubungannya dengan pembangunan manusia, dinyatakan dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yaitu : " Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila " (GBHN, 1983, h.20).

Tujuan pembangunan Nasional jangka panjang, dinyatakan dalam GBHN tahun 1983 sebagai berikut :

Titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedang pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi (GBHN, 1983, h. 20).

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, pendidikan merupakan sarana penting yang dapat mempengaruhi lajunya pembangunan tersebut. Santoso S. Hamijoyo (1970) mengemukakan arti pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat secara luas adalah " edukasi " (membimbing, membina atau membangun) untuk menumbuhkan prasyarat mental pembangunan yaitu alam pikiran, sikap cara-cara hidup yang menguntungkan bagi tumbuhnya kerauan, inisiatif dan swadaya untuk memecahkan masalah-masalah dan kebutuhan diri dan masyarakat di lingkungannya sehingga terdapat peningkatan keadaan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik.

Permasalahan pendidikan yang sedang dihadapi saat ini adalah semakin sulitnya sekolah menampung siswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan di sekolah kurang mampu memberikan bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada lulusannya dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin kompleks (Winarno Surakhmad, 1986, h.4).

Beberapa masalah pendidikan yang sulit dijangkau oleh sistem pendidikan sekolah, karena keterbatasan dari jangkauan sistem persekolahan dan dana yang harus dikeluarkan dalam pengembangannya antara lain : Pertama, adalah anggota masyarakat yang telah bekerja karena kemajuan teknologi sehingga membutuhkan pengetahuan, sikap dan keterampilan baru dalam melaksanakan pekerjaannya. Kedua, anak - anak remaja yang mengalami gangguan sosial atau yang melakukan tindakan kriminal akibat perubahan nilai dan norma dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Ketiga, anak-anak dan orang dewasa yang tidak sempat mengikuti pendidikan di sekolah karena berbagai alasan. Keempat, anggota masyarakat yang memiliki keinginan untuk terus memperbaiki hasil pekerjaannya. Kelima, organisasi - organisasi sosial ekonomi yang berkeinginan untuk meningkatkan aktifitasnya. Keenam, anak-anak yang telah menamatkan sekolah akan tetapi belum memiliki pekerjaan tetap yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah diikutinya. Ketujuh, anggota masyarakat yang membutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi kondisi lingkungan yang kurang sehat akibat penggunaan alat - alat teknologi mutakhir.

Dengan demikian pengembangan sistem pendidikan hanya pada sistem persekolahan saja, tidak akan mampu menghadapi tantangan pendidikan yang sedang dihadapi dewasa ini. Pengembangan sistem pendidikan luar sekolah yang

meliputi pendidikan non- formal dan in-formal akan dapat membantu dalam menanggulangi masalah - masalah pendidikan yang sedang dihadapi itu.

Pendidikan luar sekolah sebagai subsistem dari sistem pendidikan Nasional, mampu memberikan peluang lebih besar untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah dimilikinya. Belajar dalam pendidikan luar sekolah tidak diartikan secara sempit yaitu menerima informasi dan pencapaian keterampilan saja, akan tetapi belajar diartikan sebagai suatu usaha yang terus menerus dalam mencari dan meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam kehidupannya. Kegiatan belajar dalam pendidikan luar sekolah antara lain meliputi : hubungan sosial, adat kebiasaan dan norma-norma yang terus berkembang di masyarakat.

Dalam hal ini pendidikan luar sekolah, mampu memberikan andil dalam mengembangkan sumber daya manusia sebagai sumber utama dalam mencapai tujuan pembangunan.

2. Masalah dan Rumusannya

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata telah membawa kemajuan baik fisik maupun non-fisik, seperti di bidang pertanian Indonesia telah dapat melepaskan identitas sebagai pengimpor beras terbesar di Asia. Dalam komoditi lain seperti, cengkih, kopi, karet,

ikan telah menunjukkan peningkatan. Sektor perikanan dalam kurun waktu tahun 1979 - 1981 terdapat peningkatan yaitu :

Produksi ikan meningkat rata-rata 4,3 persen/ tahun, yang terdiri dari kenaikan ikan laut 4,2 persen dan ikan darat 4,7 persen. Ekspor hasil perikanan dalam Pelita III meningkat terutama komoditi ikan segar dengan rata-rata 33,1 persen untuk volume ekspor dan 40,5 persen untuk nilai ekspor (AT. Birowo, 1983, h.1).

Permasalahan yang timbul di balik keberhasilan dalam meningkatkan produksi khususnya pertanian, ternyata menurut beberapa ahli bahwa peningkatan produksi secara keseluruhan dapat memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup pada sebagian masyarakat terutama kelompok masyarakat bawah (miskin), bahkan keadaan hidupnya semakin menurun.

Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain adalah peningkatan produksi yang telah dicapai, kurang dibarengi oleh peningkatan kesempatan kerja bagi anggota masyarakatnya. Perbandingan antara pertambahan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, dapat dilihat pada data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1986 yaitu, jumlah angkatan kerja terdapat 68,928 juta orang dan yang bekerja 65,7 juta orang sehingga terdapat angkatan kerja yang tidak bekerja sebanyak 3,228 juta orang. Dengan demikian keadaan ini akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakatnya.

Program - program pembangunan ekonomi, pendapatan, tingkat hidup, dan mutu kehidupan masyarakat yang telah

dilaksanakan selama ini, lebih membawa peningkatan yang cepat pada kelompok masyarakat tingkat menengah dan kelompok atas serta masyarakat di daerah perkotaan. Keadaan ini terlihat pada data tahun 1970 - 1976 sebagai berikut :

Penduduk sangat miskin yang berpendapatan di bawah 360 Kg beras/ tahun di daerah perkotaan Jawa menurun dari 44 persen menjadi 27 persen, sedangkan di daerah pedesaan (lebih kecil dari 240 Kg beras/tahun/kapita) menurun dari 40 persen menjadi 34 persen. Di luar Jawa angka-angkanya adalah di perkotaan menurun dari 39 persen menjadi 23 persen dan di daerah pedesaan menurun dari 28 persen menjadi 20 persen. Pada tahun 1980 diperkirakan bahwa dari seluruh penduduk Indonesia 35 persen masih berada di bawah garis kemiskinan, diantaranya 17 persen dalam keadaan melarat dengan pendapatan Rp 168,00/orang setiap hari.

Thee Kian Wie(1981,h.71), menganalisis distribusi pendapatan hasil pembangunan dengan ukuran 40 persen penduduk yang tergolong penghasilan lebih rendah,40 persen penduduk yang berpenghasilan menengah dan 20 persen penduduk yang pendapatannya tergolong tinggi. Hasil analisis itu ternyata distribusi pendapatan nasional masih timpang, karena 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah hanya menerima sekitar 20 persen dari seluruh pendapatan nasional , sedangkan 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi menerima sekitar 40 persen dari pendapatan nasional itu.

Masyarakat nelayan sebagai salah satu dari kelompok masyarakat Indonesia, tingkat kesejahteraannya masih tergolong rendah. Hasil penelitian Emerso 1979(Mubyarto, 1984,h.16) di wilayah PPWP (Program Pengembangan Wilayah

Propinsi) Jawa Tengah sebagai berikut :

Golongan nelayan di daerah PPWP (Program Pengembangan Wilayah Propinsi) telah benar-benar ketinggalan dibanding dengan golongan lain di luar usahaperikanan atau dengan golongan nelayan di Propinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Selanjutnya hasil penelitian Mubyarto (1984,h.18) di daerah tersebut mengemukakan bahwa, nelayan yang masih menggunakan perlengkapan penangkapan kecil (motor tempel) dan buruh nelayan tingkat kehidupannya semakin memburuk. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya nelayan pada kelompok besar yaitu nelayan yang mengoperasikan alat-alat tangkap yang cukup besar seperti pukat harimau maupun trawl, sehingga para nelayan kecil itu tidak mampu bersaing dalam melakukan penangkapan bahkan mereka sulit untuk mempertahankan tingkat produksi yang telah dicapainya.

Mengenai keadaan masyarakat miskin dikemukakan Emil Salim (1980,h. 60) bahwa, penduduk miskin di negara-negara yang sedang berkembang memiliki ciri - ciri umum yang serupa yaitu : Pertama, bagian terbesar dari mereka terdapat di daerah pedesaan dan pada umumnya buruh tani. Mereka tidak memiliki tanah sendiri; walaupun ada yang memilikinya tidaklah seberapa dan tidak cukup untuk membiayai hidup yang layak. Kedua, bagian yang lain adalah penganggur atau setengah penganggur. Walaupun ada pekerjaan maka sifatnya tidak teratur atau pekerjaan itu tidaklah memberi pendapatan yang memadai .

bagi tingkat hidup yang wajar. Ketiga, mereka berusaha sendiri, biasanya dengan menyewa peralatan orang lain. Sifat usaha mereka adalah kecil karena ketiadaan modal.

Keadaan golongan masyarakat miskin, dalam sikap mental dan pola perilaku usahanya lebih mendahulukan keselamatan hidup dari pada melakukan kegiatan usaha yang mengandung resiko. Mereka takut menanggung resiko terjerumus ke dalam jurang kehinaan, meminta-minta (etika subsistensi) James Scott (1976). Pada golongan masyarakat miskin, dalam kegiatan usahanya cenderung untuk mempertahankan keadaan minimum dan subsistensi yang telah dialaminya sehingga mereka akan sulit untuk menerima sesuatu yang baru yang lebih menguntungkan. Hal ini yang sering menimbulkan kesan bahwa, kelompok masyarakat ini seolah-olah ingin gampang saja. Astrid S. Susanto (1984, h. 113) mengemukakan tentang keadaan kelompok miskin sebagai berikut :

- (a) Situasi keluarga dengan ibu sebagai fokus kehidupan keluarga, pengelola dan pengendali keluarga.
- (b) Kurang mampu merencanakan masa depan dan mengutamakan apa yang dapat dicapai dalam jangka pendek.
- (c) Sikap agresif-fisik.
- (d) Sikap memberi reaksi impulsif-emosional.
- (e) Sikap fatalistik/ pasrah terhadap kehidupan masa kini dan masa datang.

Pendekatan dalam pengembangan kelompok masyarakat ini maupun pada kelompok masyarakat lainnya, dilakukan dengan menggunakan pendekatan makro (struktural) maupun mikro(individual). Pendekatan makro dilakukan dengan cara mengembangkan kelembagaan yang telah ada di

lingkungan masyarakat serta mengembangkan kelembagaan yang baru, sedangkan pendekatan mikro lebih menitik beratkan pada peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan setiap anggota masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dalam usaha pengembangan masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara seragam, artinya melakukan dengan cara - cara yang persis sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini karena setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik, kebutuhan dan potensi yang berbeda satu dengan lainnya. Dengan demikian dalam usaha pengembangan masyarakat perlu di dasarkan pada keadaan masyarakat dengan segala potensi yang dimilikinya.

Penelitian ini berusaha mengemukakan tentang keadaan kelompok nelayan yang meliputi keadaan kehidupannya, kegiatan usaha meningkatkan pendapatan dalam rangka menemukan model kegiatan belajar sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan belajar para nelayan dalam meningkatkan pendapatannya.

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Desa Sungaibuntu dan Cemarajaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola perilaku usaha para nelayan dalam meningkatkan pendapatan di desa Sungaibuntu dan Cemara-jaya kecamatan Pedes kabupaten Karawang Jawa Barat itu ?
- b. Apakah terdapat perbedaan pola perilaku usaha di kalangan para nelayan, khususnya pada kelompok nelayan juragan tidak ke laut dan nelayan juragan yang turun ke laut dalam meningkatkan pendapatannya ?
- c. Apakah terdapat hubungan antara tingkat kemampuan dalam usaha pengadaan modal, kegiatan produksi, memasarkan ikan dan perluasan kegiatan usaha para nelayan dengan keberhasilan usaha meningkatkan pendapatannya ?
- d. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, jumlah tanggungan anggota keluarga dan latar belakang asal keluarga para nelayan dengan tingkat keberhasilan dalam usaha meningkatkan pendapatannya?
- e. Apakah terdapat masalah-masalah pendidikan luar sekolah dalam pola perilaku para nelayan dalam usaha meningkatkan pendapatannya ?
- f. Sumber-sumber belajar apa yang ada dan dapat dimanfaatkan, untuk memenuhi kebutuhan belajar para nelayan menanggulangi masalah-masalah dalam usaha meningkatkan pendapatannya ?
- g. Model kegiatan belajar pendidikan luar sekolah yang

bagaimana , untuk memenuhi kebutuhan belajar para nelayan menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi dalam usaha meningkatkan pendapatannya?

3. Tujuan Penelitian

a. Umum :

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola perilaku usaha para nelayan dalam meningkatkan pendapatannya, kemudian mengemukakan permasalahan yang dihadapinya dan khususnya masalah - masalah pendidikan luar sekolah serta model kegiatan belajar sebagai alternati untuk memenuhi kebutuhan belajar para nelayan menanggulangi masalah - masalah yang dihadapinya dalam usaha meningkatkan pendapatan .

b. Khusus :

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut :

- 1) Mengetahui bagaimana pola perilaku usaha para nelayan dalam meningkatkan pendapatannya, terutama di kalangan kelompok nelayan juragan tidak ke laut dan nelayan juragan yang turun ke laut di desa Sungaibuntu dan Cemarajaya Kecamatan Pedesa Karawang Jawa Barat.
- 2) Mengetahui apakah terdapat perbedaan pola perilaku usaha diantara kelompok nelayan tersebut, dalam meningkatkan pendapatannya ?
- 3) Mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat

kemampuan para nelayan dalam usaha pengadaan modal, kegiatan produksi, memasarkan ikan dan perluasan kegiatan usahanya dengan tingkat keberhasilan . . . meningkatkan pendapatan.

4) Mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan latar belakang asal keluarga para nelayan dengan tingkat keberhasilan meningkatkan pendapatannya.

5) Mengetahui apakah terdapat masalah-masalah yang dihadapi khususnya masalah-masalah pendidikan luar sekolah dalam pola perilaku usaha para nelayan untuk meningkatkan pendapatannya.

6) Mengemukakan sumber-sumber belajar yang ada dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belajar para nelayan menanggulangi masalah-masalah dalam usaha meningkatkan pendapatannya ?

7) Menemukan model kegiatan belajar pendidika luar sekolah , untuk memenuhi kebutuhan belajar para nelayan menanggulangi masalah-masalah dalam usaha meningkatkan pendapatannya.

4. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola perilaku usaha para nelayan khususnya nelayan juragan yang tidak ke laut dan yang turun ke laut dalam meningkatkan pendapatannya.

Kemudian akan dikemukakan model kegiatan belajar pendidikan luar sekolah sebagai alternatif, untuk memenuhi kebutuhan belajar para nelayan dalam usaha meningkatkan pendapatannya.

Dengan demikian secara praktis hasil penelitian ini, akan menjadi bahan masukan pada berbagai pihak yang memiliki bidang tugas membangun masyarakat nelayan khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan bagi para nelayan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini hanya merupakan suatu studi kasus sehingga tidak dapat menarik beberapa generalisasi dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini minimal akan memberikan sumbangan pada hasil-hasil penelitian tentang masyarakat nelayan yang telah dilakukan pada daerah yang lain.

Secara teoritis penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pada teori pendekatan pembangunan yang dilaksanakan dari bawah dan model perencanaan serta kegiatan belajar orang dewasa.